



LINGKAR EKONOMIKA

Available at: <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jle/index>

e-ISSN 3032-0747

Menakar Kemandirian Fiskal Daerah dengan *Flypaper Effect* di Indonesia Tahun 2024

Rifki Romadhan^{1*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*Corresponding Author: rifki.romadhan@mhs.unsoed.ac.id

Informasi Artikel	Abstract
Diterima: 7 Oktober 2025	<i>This study aims to measure the level of fiscal independence of Indonesian provinces by examining the existence of the flypaper effect in the 2024 fiscal year. The research employs secondary data from 38 provinces obtained from the Ministry of Finance's regional budget realization reports. Multiple linear regression with a logarithmic approach was used to analyse the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) and Central Government Transfers (TKDD) on Regional Expenditure. The results show that both PAD and TKDD have a positive and significant impact on expenditure, yet the coefficient of TKDD (0.7577) is higher than PAD (0.3156). This finding indicates that regional spending is more responsive to central government transfers than to local revenue, confirming the presence of the flypaper effect at the provincial level in 2024. The study highlights the persistent fiscal dependency of many provinces on central transfers and the limited capacity of PAD. Therefore, fiscal policy reforms are necessary to strengthen PAD capacity in order to achieve genuine fiscal independence rather than merely administrative autonomy.</i>
Disetujui: 21 Oktober 2025	
Dipublikasikan: 24 Oktober 2025	
Kata Kunci: Kemandirian Fiskal, Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD), Belanja Daerah, Desentralisasi Fiskal	

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menakar tingkat kemandirian fiskal provinsi-provinsi di Indonesia dengan menguji keberadaan *flypaper effect* sepanjang tahun anggaran 2024. Data yang digunakan adalah data sekunder dari 38 provinsi yang diperoleh dari laporan realisasi APBD Kementerian Keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pendekatan logaritmik untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan TKDD berpengaruh positif serta signifikan terhadap belanja, namun koefisien TKDD (0,7577) lebih besar dibanding PAD (0,3156). Hal ini membuktikan bahwa belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer pusat dibandingkan pendapatan lokal, sehingga *flypaper effect* terbukti terjadi di tingkat provinsi pada tahun 2024. Temuan ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat dan lemahnya kapasitas PAD di sebagian besar provinsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan fiskal daerah yang menekankan penguatan kapasitas PAD agar kemandirian fiskal dapat terwujud secara substantif, bukan hanya administratif.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang diterapkan sejak awal 2000-an merupakan tonggak penting dalam sistem keuangan daerah di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya fiskalnya secara mandiri, dengan harapan tercapainya kemandirian fiskal dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Namun, dalam praktiknya, banyak daerah masih bergantung secara signifikan pada dana transfer dari pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga memunculkan fenomena yang dikenal dengan *flypaper effect*.

Flypaper effect terjadi ketika belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer dari pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena ini mengindikasikan bahwa alih-alih mengembangkan potensi pendapatan lokal, daerah lebih memilih untuk mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan dapat menghambat upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang.

Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa *flypaper effect* masih terjadi di banyak daerah di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Rahmasari et al. (2024) menemukan bahwa meskipun tidak secara umum terjadi *flypaper effect*, daerah dengan pembiayaan lokal yang rendah masih menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer. Sementara itu, studi oleh Ramadhani et al. (2022) secara eksplisit menunjukkan bahwa *flypaper effect* masih terjadi di kawasan Indonesia Timur, menandakan masih lemahnya kemandirian fiskal.

Penelitian oleh Rafi dan Arza (2023) juga menemukan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara signifikan mempengaruhi belanja daerah di Provinsi Sumatera Barat, dengan koefisien DAU lebih tinggi dari PAD, indikator kuat terjadinya *flypaper effect*. Hal serupa diungkap oleh Wulandari dan Gantyowati (2021), yang membuktikan bahwa belanja daerah di banyak kabupaten/kota masih sangat tergantung pada DAU, terutama di daerah dengan tren penurunan PAD.

Untuk menggambarkan kondisi terkini, dapat dilihat dalam tabel yang menampilkan data tahun 2024 dari seluruh provinsi di Indonesia, mencakup pengeluaran pemerintah daerah, total

transfer pusat (TKDD), dan PAD. Dari data tersebut terlihat bahwa provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki PAD yang cukup besar sehingga relatif mandiri, sedangkan provinsi seperti Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Sulawesi Barat memiliki PAD yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai pengeluaran, mengindikasikan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dan potensi kuat terjadinya *flypaper effect*.

Provinsi	Pengeluaran (Miliar Rupiah)	TKDD (Miliar Rupiah)	PAD (Miliar Rupiah)
Aceh	9973,4	7850,39	2780,87
Sumatera Utara	12164,72	5538,31	6967,71
Sumatera Barat	5831,79	3318,65	2736,96
Riau	10601,01	3824,27	4106,55
Jambi	9910,66	5329,5	4772,45
Sumatera Selatan	9910,66	5329,5	4772,45
Bengkulu	2879,25	1940,71	1007,8
Lampung	7041,63	2861,22	3725,83
Kep. Bangka Belitung	2088,29	1354,38	813,68
Kep. Riau	3620,15	1851,05	1831,69
DKI Jakarta	62244,59	18393,73	47538,64
Jawa Barat	34929,24	10999,81	27429,69
Jawa Tengah	27184,46	8701,44	17650,92
DI Yogyakarta	5188,94	2311,24	2293,89
Jawa Timur	34561,36	11956,41	23454,7
Banten	10977,91	3246,6	8316,32
Bali	6654,12	2101,73	5127,09
Nusa Tenggara Barat	5916,2	319391	2454,72
Nusa Tenggara Timur	4441,06	3240,32	1374,92
Kalimantan Barat	5531,57	2880,12	3140,82
Kalimantan Tengah	8643,76	4528,91	2600,87
Kalimantan Selatan	5677,04	2949,03	2623,22
Kalimantan Timur	7616,33	3120,2	3892,87
Kalimantan Utara	3223,38	2279,03	945
Sulawesi Utara	2817,78	1995,95	1467,16
Sulawesi Tengah	5111,28	3212,29	1947,81
Sulawesi Selatan	8264,27	4058,72	4772,32
Sulawesi Tenggara	4282,73	3159,59	1462,92
Gorontalo	1770,43	1271,14	490,31
Sulawesi Barat	1536,86	1174,95	422,49
Maluku	2804,74	2237,65	572,83
Maluku Utara	2047,27	1917,02	623,86
Papua Barat	4481,37	3959,7	230,32
Papua Barat Daya	2055,61	1709,72	206,13
Papua	2209,74	1285,79	382,63
Papua Selatan	1764,7	1470,18	192,8
Papua Tengah	3584,76	2258,84	540,84
Papua Pegunungan	1377,2	1639,23	148,55

Tabel 1 Data Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Pengeluaran, TKDD, dan PAD)
Sumber: Kemenkeu

Sebagai contoh, berdasarkan data dari Kemenkeu tahun 2024 yang ditampilkan pada Tabel 1 menunjukkan perbedaan mencolok antara provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi dan rendah. Papua Pegunungan, misalnya, mencatat PAD hanya sebesar Rp148,54 miliar dengan pengeluaran Rp1.377,2 miliar, sementara DKI Jakarta memiliki PAD Rp47.538,64 miliar dengan pengeluaran Rp62.244,59 miliar. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa *kemandirian fiskal* belum merata, dan *flypaper effect* cenderung terjadi di wilayah dengan PAD rendah. Temuan ini diperkuat oleh Septianingrum et al. (2025) yang menyebutkan bahwa *flypaper effect* lebih dominan terjadi di daerah “miskin fiskal”.

Meskipun beberapa studi terbaru seperti Wira dan Dewi (2023) menunjukkan tidak terjadinya *flypaper effect* pada periode 2019–2021 secara agregat, penelitian lain oleh Trisyanti dan Saputra (2022) dan Yudhistira et al. (2022) justru menyimpulkan bahwa *flypaper effect* tidak hanya ada, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap kinerja fiskal daerah.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis fenomena *flypaper effect* secara nasional dengan menggunakan data tahun 2024 dari seluruh provinsi di Indonesia. Fokus utama terletak pada evaluasi pengaruh PAD dan TKDD terhadap belanja daerah serta identifikasi pola kemandirian fiskal antarprovinsi. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan landasan empiris bagi perumusan kebijakan fiskal yang mendorong peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

METODE ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh dua variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), terhadap Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeteksi keberadaan fenomena *flypaper effect* melalui perbandingan koefisien pengaruh PAD dan TKDD terhadap belanja daerah.

Model penelitian ini bersifat eksplanatif, karena berupaya menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel, khususnya bagaimana besarnya PAD dan transfer fiskal memengaruhi pengeluaran daerah, serta bagaimana kondisi ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal masing-masing provinsi. Desain ini cocok digunakan untuk penelitian yang ingin menguji hipotesis empiris berbasis teori fiskal desentralisasi dan *flypaper effect*.

Penelitian akan menggunakan data sekunder tahun 2024, yang diambil dari laporan keuangan pemerintah provinsi yang tersedia melalui sumber resmi seperti Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB). Data akan dianalisis menggunakan model regresi linier berganda dengan struktur sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot \text{TKDD} + \beta_2 \cdot \text{PAD} + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah (Total Pengeluaran Pemerintah Daerah), sebagai variabel dependen

α = Intercept atau konstanta regresi (nilai belanja ketika Transfer dan PAD = 0)

β_1 = Koefisien regresi Transfer, mengukur seberapa besar pengaruh dana transfer dari pusat terhadap belanja daerah

β_2 = Koefisien regresi PAD, mengukur seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah

ε = Error term atau residu, mencerminkan pengaruh faktor lain di luar model

Dengan kriteria:

- Jika $\beta_1 > \beta_2$, maka terindikasi terjadinya *flypaper effect*.
- Jika $\beta_2 \geq \beta_1$, maka tidak terdapat *flypaper effect*, dan daerah dinilai relatif lebih mandiri secara

fiskal.

Teknik analisis ini akan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik EViews, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Uji Deskriptif Statistik untuk melihat karakteristik umum data (rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum).
2. Uji Asumsi Klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas model regresi.
3. Uji Regresi Linier Berganda untuk menguji hubungan simultan dan parsial antarvariabel.
4. Uji Signifikansi (uji t dan uji F) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial dan bersama-sama.
5. Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar variasi belanja daerah dapat dijelaskan oleh PAD dan TKDD.

Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai penelitian sebelumnya, seperti studi oleh Rafi dan Arza (2023), yang menggunakan regresi linier berganda untuk menguji *flypaper effect* pada pemerintah daerah di Sumatera Barat. Begitu pula dengan Trisyanti dan Saputra (2022), yang menggunakan fixed effect model dalam kerangka regresi panel.

Pemilihan desain kuantitatif ini juga sejalan dengan pendekatan yang dilakukan oleh Ramadhani et al. (2022), yang membuktikan *flypaper effect* di provinsi-provinsi di Indonesia Timur menggunakan data panel antarwilayah. Dalam konteks ini, desain penelitian ini memperluas cakupan dengan menyasar seluruh provinsi di Indonesia secara cross-section (tahun tunggal), yang lebih kontekstual terhadap kondisi fiskal terbaru tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Data

Penelitian ini menggunakan data dari 38 provinsi di Indonesia berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2024. Data diperoleh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mencakup tiga variabel utama, yaitu:

- Belanja Daerah (Y): Total pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai layanan publik.
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (X1): Dana yang ditransfer dari pusat ke daerah meliputi DAU, DAK, dan DBH.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2): Pendapatan yang diperoleh dari potensi ekonomi daerah sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ketiga variabel tersebut dalam rangka mengidentifikasi adanya *flypaper effect* dan menilai tingkat kemandirian fiskal masing-masing provinsi.

Ketiga variabel tersebut digunakan untuk mengukur apakah belanja daerah lebih dipengaruhi oleh TKDD dibanding PAD, serta untuk melihat sejauh mana daerah mampu membiayai pengeluarannya secara mandiri. Untuk memberikan gambaran awal terhadap karakteristik data, disajikan ringkasan statistik deskriptif berikut:

Tabel 2 Tabel Statistik Deskriptif

Statistik	Belanja Daerah (M)	TKDD (M)	PAD (M)
Rata-rata	8.971,59	3.979,84	5.207,72
Median	5.360,25	3.034,62	2.378,96
Maksimum	62.244,59	18.393,73	47.538,64
Minimum	1.377,20	813,66	148,54
Standar Deviasi	11.937,50	3.584,64	9.262,75
Range	60.867,39	17.580,07	47.390,10

Sumber: Data Diolah dengan EViews

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa:

- Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar Rp8.971,59 miliar, dengan sebaran yang sangat lebar (standar deviasi Rp11.937,50 miliar). Provinsi dengan belanja tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp62.244,59 miliar, sedangkan yang terendah adalah Papua Pegunungan sebesar Rp1.377,20 miliar. Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran fiskal antar daerah.
- TKDD rata-rata sebesar Rp3.979,84 miliar, menunjukkan besarnya peran dana transfer pusat dalam mendanai aktivitas pemerintahan daerah. Rentang nilai yang lebar antara minimum (Rp813,66 miliar) dan maksimum (Rp18.393,73 miliar) menegaskan adanya kesenjangan fiskal antarwilayah.
- PAD sebagai cerminan kemandirian fiskal daerah, menunjukkan rata-rata sebesar Rp5.207,72 miliar. Namun, variasinya sangat tinggi dengan standar deviasi mencapai Rp9.262,75 miliar. DKI Jakarta menjadi daerah dengan PAD tertinggi (Rp47.538,64 miliar), jauh melampaui daerah dengan PAD terendah seperti Papua Pegunungan (Rp148,54 miliar).

Ketimpangan PAD yang sangat besar ini menegaskan temuan Trisyanti dan Saputra (2022), bahwa kapasitas fiskal daerah di Indonesia sangat bervariasi. Selain itu, penelitian Ramadhani et al. (2022) menunjukkan bahwa dalam konteks ketimpangan ini, dana transfer cenderung lebih efektif mendorong belanja di daerah tertinggal dibanding PAD, memperkuat indikasi terjadinya *flypaper effect*.

Hasil Estimasi Model OLS

Untuk menguji hubungan antara dana transfer pusat (TKDD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah, dilakukan estimasi model regresi linier berganda menggunakan pendekatan logaritmik (log-log model). Pendekatan ini bertujuan untuk menginterpretasikan koefisien sebagai elastisitas, yaitu perubahan persentase belanja daerah akibat perubahan persentase dari variabel independen. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\log(\text{Belanja Daerah}) = \alpha + \beta_1 \log(\text{TKDD}) + \beta_2 \log(\text{PAD}) + \varepsilon$$

Pendekatan ini telah digunakan oleh berbagai penelitian terdahulu untuk mendeteksi *flypaper effect*, seperti yang dilakukan oleh Trisyanti dan Saputra (2022) dan Ramadhani et al. (2022), yang menegaskan bahwa penggunaan log model efektif dalam menangkap perbedaan pengaruh antara sumber dana terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Adapun hasil estimasi regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Tabel Hasil Estimasi OLS

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob (p-value)
C (Intercept)	0.137068	0.365301	0.375219	0.7098
LOG_TKDD	0.757748	0.066285	11.4317	0.0000
LOG_PAD	0.315573	0.030921	10.2059	0.0000

Sumber: Data Diolah dengan EViews

Goodness of Fit:

- R-squared: 0.9745
- Adjusted R-squared: 0.9730
- F-statistic: 668.50
- Prob (F-statistic): 0.0000
- Durbin-Watson stat: 1.4407

Hasil regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yakni Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini terlihat dari nilai p-value keduanya yang berada di bawah 0,01, menandakan signifikansi tinggi pada tingkat kepercayaan 99%.

Koefisien β_1 (TKDD) sebesar 0,7577 menunjukkan bahwa jika TKDD meningkat 1%, maka belanja daerah akan meningkat sebesar 0,76%, ceteris paribus. Sementara itu, β_2 (PAD) sebesar 0,3156 mengindikasikan bahwa kenaikan PAD sebesar 1% hanya mendorong peningkatan belanja sebesar 0,32%. Ini berarti dampak dana transfer pusat terhadap belanja daerah lebih dari dua kali lipat lebih besar dibandingkan PAD.

Temuan ini memperkuat bukti empiris adanya *flypaper effect*, yakni fenomena ketika dana transfer dari pusat lebih “menempel” dan dibelanjakan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan dana yang bersumber dari pendapatan lokal. Konsep ini diperkenalkan oleh Hines dan Thaler (1995), dan banyak dikonfirmasi dalam konteks Indonesia oleh Rafi dan Arza (2023) dan Septianingrum et.al. (2025).

Selain itu, nilai R-squared sebesar 0,9745 menandakan bahwa sekitar 97,45% variasi dalam belanja daerah dapat dijelaskan oleh variasi dalam TKDD dan PAD. Ini menunjukkan model memiliki daya jelaskan yang sangat kuat. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,44 juga menunjukkan tidak adanya autokorelasi serius dalam residual, memperkuat validitas model.

Implikasinya, pemerintah daerah cenderung lebih responsif terhadap dana yang diberikan pusat dibandingkan terhadap upaya menggali potensi pendapatan asli daerah. Kondisi ini berpotensi melemahkan semangat otonomi fiskal dan menjadi sinyal penting bagi pemerintah pusat dalam merancang kebijakan transfer yang lebih kondisional dan berbasis kinerja.

Dengan demikian, temuan ini mengonfirmasi bahwa *flypaper effect* benar-benar terjadi pada tingkat provinsi di Indonesia tahun 2024, dan menunjukkan pentingnya memperkuat kapasitas PAD agar ketergantungan fiskal dapat dikurangi secara struktural.

Setelah menggambarkan ketimpangan fiskal melalui regresi, langkah analitis selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah variabel bebas, yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Selain itu, uji ini juga digunakan untuk menilai keberadaan *flypaper effect*, yaitu fenomena ketika dana transfer memiliki pengaruh lebih besar terhadap belanja daerah dibanding PAD.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui nilai t-statistik dan p-value pada masing-masing koefisien regresi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- $H_0: \beta = 0$ (tidak terdapat pengaruh signifikan)
- $H_1: \beta \neq 0$ (terdapat pengaruh signifikan)

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika p-value < 0,05, maka H_0 ditolak dan variabel berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
- Jika p-value $\geq$ 0,05, maka H_0 gagal ditolak dan variabel tidak berpengaruh signifikan.

Dari hasil regresi (Tabel 4.1), diperoleh:

Tabel 4 Tabel Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	t-Statistik	p-Value
LOG_TKDD	0,7577	11,43	0,0000
LOG_PAD	0,3156	10,21	0,0000

Sumber: Data Diolah dengan EViews

Setelah dilakukan estimasi model menggunakan metode OLS, tahap selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil uji t dan uji F untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

1. Uji t (Parsial): Signifikansi Variabel Independen

Berdasarkan hasil estimasi model OLS yang disajikan pada Subbab 4.2, diperoleh nilai koefisien dan p-value sebagai berikut:

- Variabel LOG_TKDD memiliki koefisien sebesar 0,7577, dengan nilai t-statistik 11,43 dan p-value 0,0000.
- Variabel LOG_PAD memiliki koefisien sebesar 0,3156, dengan nilai t-statistik 10,21 dan p-value 0,0000.

Nilai p-value keduanya jauh di bawah tingkat signifikansi 5% (0,05), yang berarti bahwa PAD maupun TKDD berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja daerah. Dengan kata lain, semakin besar PAD maupun TKDD yang diterima suatu provinsi, maka belanja daerahnya cenderung meningkat secara nyata. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua sumber pendanaan memiliki peran yang substansial dalam mendorong belanja publik di tingkat provinsi.

2. Uji F (Simultan): Signifikansi Model

Secara simultan, model regresi menghasilkan nilai F-statistic sebesar 668,50 dengan p-value 0,0000. Nilai ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, variabel PAD dan TKDD bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Artinya, model regresi ini mampu menjelaskan hubungan struktural antara pendapatan daerah dan transfer pusat dengan perilaku pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini menguatkan validitas model dan mendukung kelayakan analisis lebih lanjut terkait *flypaper effect*.

Salah satu inti analisis dalam penelitian ini adalah menguji apakah terjadi *flypaper effect* di tingkat provinsi. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan besarnya koefisien regresi antara TKDD dan PAD. Dari hasil regresi, terlihat bahwa:

- Koefisien TKDD ($\beta_1 = 0,7577$) jauh lebih besar dibandingkan PAD ($\beta_2 = 0,3156$).
- Kedua variabel signifikan secara statistik (p-value = 0,0000).

Perbedaan nilai koefisien ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan terhadap PAD yang mereka hasilkan sendiri. Secara teoritis, hal ini merupakan ciri utama dari fenomena *flypaper effect*: dana yang berasal dari luar (pusat) justru mendorong belanja lebih besar ketimbang dana lokal, seolah “menempel” di anggaran belanja begitu diterima.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya oleh Septianingrum et.al. (2025) yang menemukan bahwa *flypaper effect* cenderung lebih kuat di daerah dengan kapasitas PAD yang rendah. Rafi dan Arza (2023) juga menemukan hasil serupa di Sumatera Barat, menunjukkan bahwa dana transfer memainkan peran dominan dalam membentuk perilaku belanja daerah.

Berdasarkan hasil uji parsial dan simultan yang telah dipaparkan, serta hasil perbandingan koefisien, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah → hipotesis diterima.
2. TKDD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah → hipotesis diterima.
3. Koefisien TKDD > PAD dan keduanya signifikan → terjadi *flypaper effect*.

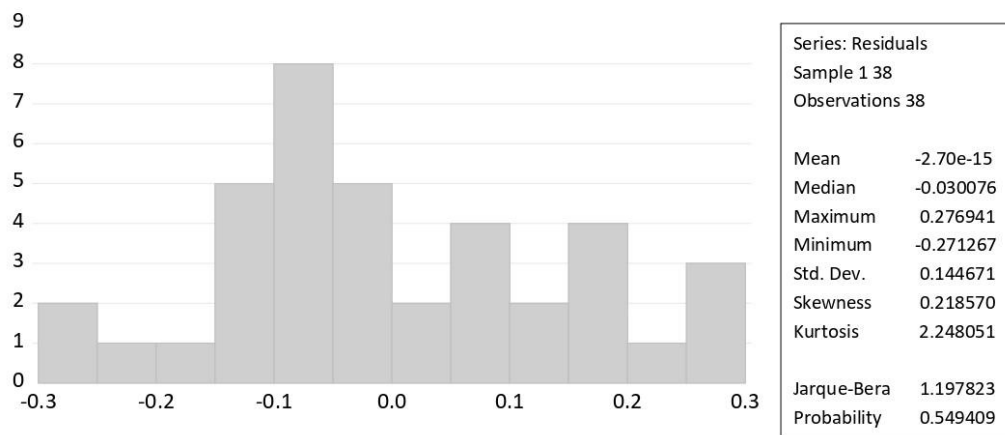
Dengan demikian, hipotesis utama dalam penelitian ini terbukti secara empiris. Pemerintah daerah lebih terdorong untuk membelanjakan dana yang mereka terima dari pusat dibanding dana yang mereka hasilkan sendiri. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, yang masih rentan terhadap ketergantungan pada dana transfer pusat.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum menarik kesimpulan dari hasil estimasi regresi linier, langkah penting yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa model telah memenuhi asumsi-asumsi klasik. Asumsi ini mencakup normalitas residual, tidak adanya multikolinearitas, homoskedastisitas (varian residual konstan), dan tidak terjadi autokorelasi antar residual. Pemenuhan asumsi-asumsi ini penting untuk menjamin bahwa parameter estimasi bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) sebagaimana disyaratkan dalam pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS).

Berikut adalah hasil pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini:

1. Uji Normalitas Residual



Gambar 1 Uji Normalitas Residual

Uji normalitas dilakukan menggunakan pendekatan Jarque-Bera, yang mengukur seberapa jauh distribusi residual menyimpang dari distribusi normal.

Hasil pengujian menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 1,198 dengan probabilitas sebesar 0,549. Nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa residual menyebar normal. Hal ini juga diperkuat oleh bentuk histogram yang simetris, dengan rata-rata dan median residual mendekati nol.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga estimasi regresi dapat dianggap sah secara statistik. Pendekatan ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rafi dan Arza (2023), yang juga menggunakan uji Jarque-Bera dalam analisis fiskal daerah.

2. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 06/13/25 Time: 00:55
Sample: 1 38
Included observations: 38

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.133445	229.1849	NA
LOG_TKDD	0.004394	491.0855	3.128827
LOG_PAD	0.000956	97.64804	3.128827

Gambar 2 Gambar Uji Multikolinearitas

Untuk menguji ada tidaknya korelasi tinggi antarvariabel independen, digunakan analisis Variance Inflation Factor (VIF). Dalam penelitian ini, nilai VIF untuk variabel LOG_TKDD dan LOG_PAD masing-masing adalah 3,13, jauh di bawah ambang batas umum sebesar 10.

Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas serius antara variabel PAD dan TKDD, sehingga kedua variabel independen dapat digunakan secara bersamaan dalam model tanpa menimbulkan bias estimasi. Hal ini sesuai dengan temuan Ramadhani et al. (2022), yang menyatakan bahwa $VIF < 5$ menunjukkan korelasi antarvariabel masih dalam batas wajar.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.480701	Prob. F(2,35)	0.0983
Obs*R-squared	4.717884	Prob. Chi-Square(2)	0.0945
Scaled explained SS	3.344918	Prob. Chi-Square(2)	0.1878

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 06/13/25 Time: 00:56
Sample: 1 38
Included observations: 38

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.067394	0.180810	0.372734	0.7116
LOG_TKDD	0.035457	0.032809	1.080732	0.2872
LOG_PAD	-0.030495	0.015304	-1.992546	0.0542

R-squared	0.124155	Mean dependent var	0.121156
Adjusted R-squared	0.074107	S.D. dependent var	0.076514
S.E. of regression	0.073624	Akaike info criterion	-2.304028
Sum squared resid	0.189719	Schwarz criterion	-2.174745
Log likelihood	46.77653	Hannan-Quinn criter.	-2.258030
F-statistic	2.480701	Durbin-Watson stat	2.030643
Prob(F-statistic)	0.098283		

Gambar 3 Gambar Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah terdapat varian residual yang tidak konstan (heteroskedastisitas), digunakan Glejser Test. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,098, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05.

Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pola penyimpangan varian residual yang sistematis, sehingga model dinyatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas. Ketiadaan heteroskedastisitas menguatkan validitas dari standar error yang dihasilkan dalam estimasi. Teknik Glejser banyak digunakan dalam studi fiskal daerah, salah satunya oleh Trisyanti dan Saputra (2022).

4. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags				
F-statistic	1.375257	Prob. F(2,33)	0.2669	
Obs*R-squared	2.923580	Prob. Chi-Square(2)	0.2318	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 06/13/25 Time: 00:57				
Sample: 1 38				
Included observations: 38				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.048929	0.363819	-0.134488	0.8938
LOG_TKDD	0.004715	0.065746	0.071723	0.9433
LOG_PAD	0.001437	0.030607	0.046946	0.9628
RESID(-1)	0.209921	0.177173	1.184838	0.2445
RESID(-2)	0.141682	0.180548	0.784731	0.4382
R-squared	0.076936	Mean dependent var	-2.70E-15	
Adjusted R-squared	-0.034950	S.D. dependent var	0.144671	
S.E. of regression	0.147178	Akaike info criterion	-0.872270	
Sum squared resid	0.714824	Schwarz criterion	-0.656798	
Log likelihood	21.57313	Hannan-Quinn criter.	-0.795607	
F-statistic	0.687628	Durbin-Watson stat	1.850330	
Prob(F-statistic)	0.605680			

Gambar 4 Gambar Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan dua metode, yaitu Durbin-Watson dan Breusch-Godfrey LM Test. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,44 berada dalam rentang nilai wajar (1,5 - 2,5), yang menandakan tidak adanya autokorelasi serius. Sementara itu, nilai probabilitas F-statistic dari LM test adalah 0,6056, yang juga lebih besar dari 0,05.

Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi serial dalam residual model regresi, sehingga tidak ada pelanggaran asumsi autokorelasi. Ini sangat penting, terutama dalam data lintas provinsi (cross-section), karena autokorelasi dapat menurunkan efisiensi estimator.

Referensi serupa ditemukan pada Septianingrum et al. (2025), yang menggunakan Durbin-Watson dan LM Test untuk mengevaluasi kestabilan residual dalam penelitian fiskal daerah.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa seluruh asumsi klasik dalam model regresi telah terpenuhi:

1. Residual berdistribusi normal
2. Tidak ditemukan gejala multikolinearitas
3. Tidak terjadi heteroskedastisitas
4. Tidak terdapat autokorelasi

Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak secara statistik dan dapat dijadikan dasar yang valid untuk menarik kesimpulan dan menguji hipotesis dalam penelitian ini.

Interpretasi Hasil

Hasil estimasi yang telah diperoleh sebelumnya memberikan gambaran penting mengenai pola belanja pemerintah daerah di Indonesia. Secara khusus, temuan ini memberikan konfirmasi yang cukup kuat mengenai keberadaan fenomena *flypaper effect*, di mana belanja daerah lebih terdorong oleh dana transfer dari pusat ketimbang oleh pendapatan yang dihimpun sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari hasil regresi linier berganda dengan pendekatan logaritmik, diketahui bahwa koefisien regresi TKDD sebesar 0,7577 jauh lebih besar dibandingkan PAD sebesar 0,3156, dan keduanya signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99%. Artinya, peningkatan dana transfer sebesar 1% direspons dengan kenaikan belanja daerah sebesar 0,76%, sedangkan peningkatan PAD sebesar 1% hanya mendorong belanja sebesar 0,32%.

Perbedaan besaran pengaruh ini bukan sekadar angka, tetapi menyimpan makna fiskal yang dalam: daerah lebih responsif terhadap dana yang datang dari pusat dibandingkan dengan dana yang mereka kumpulkan sendiri. Secara empiris, ini menjadi indikator yang kuat bahwa *flypaper effect* benar-benar terjadi di Indonesia pada tahun pengamatan 2024.

Temuan ini sejalan dengan kerangka teori *flypaper effect*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Hines dan Thaler (1995) dalam konteks ekonomi perilaku. Dalam teori tersebut, disebutkan bahwa pemerintah daerah tidak bersikap netral terhadap sumber dana, meskipun secara teoritis seharusnya mereka demikian. Transfer dana dari pusat justru menciptakan kecenderungan untuk membelanjakan lebih besar, seolah-olah “uang lebih menempel di tempat pertama kali jatuh.”

Fenomena ini menjadi lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan teori ketergantungan fiskal. Ketika kapasitas daerah dalam menggali PAD masih terbatas karena basis pajak sempit, keterbatasan SDM fiskal, atau lemahnya sistem administrasi, maka transfer dari pusat menjadi tumpuan utama. Dalam konteks ini, belanja daerah menjadi refleksi dari ketergantungan, bukan kemandirian. Ketergantungan fiskal ini sering kali melahirkan *moral hazard*, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Imran et al. (2023), yakni ketika daerah merasa tidak perlu meningkatkan PAD karena selalu ada jaminan transfer dari pusat.

Lebih jauh lagi, jika menengok kondisi fiskal masing-masing provinsi, terlihat ketimpangan yang tajam. DKI Jakarta, misalnya, mampu menghasilkan PAD lebih dari Rp47 triliun, sementara Papua Pegunungan hanya sekitar Rp148 miliar. Ketimpangan ini turut membentuk perilaku fiskal daerah: provinsi-provinsi dengan PAD tinggi cenderung lebih mandiri, sementara daerah dengan PAD rendah sangat bergantung pada transfer pusat. Dalam konteks tersebut, *flypaper effect* lebih mungkin terjadi di wilayah dengan ketergantungan fiskal tinggi – sebuah kecenderungan yang juga diungkap dalam studi Septianingrum et.al. (2025).

Hasil penelitian ini tidak berdiri sendiri. Temuan serupa juga dicatat oleh sejumlah penelitian sebelumnya. Misalnya, Rafi dan Arza (2023) menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami *flypaper effect*. Demikian pula, Ramadhani et al. (2022) membuktikan efek serupa di kawasan Indonesia Timur.

Namun demikian, ada juga penelitian yang mencatat ketidakterjadinya *flypaper effect* dalam

konteks tertentu. Wira dan Dewi (2023), misalnya, menunjukkan bahwa dalam rentang 2019-2021 secara nasional tidak ditemukan *flypaper effect* yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa *flypaper effect* bisa bersifat dinamis, tergantung pada waktu, kondisi fiskal nasional, dan desain sistem transfer yang berlaku.

Temuan dalam penelitian ini memberikan pesan penting bagi pengambil kebijakan. Jika desentralisasi fiskal ditujukan untuk mendorong kemandirian, maka ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer pusat justru menjadi ironi. *Flypaper effect* yang terdeteksi tidak hanya menandai ketergantungan fiskal, tetapi juga mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan potensi PAD di banyak daerah.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi fiskal ke depan tidak cukup hanya meningkatkan volume transfer pusat, tetapi juga harus diimbangi dengan insentif bagi daerah untuk memperkuat kapasitas PAD. Jika tidak, maka desentralisasi fiskal hanya akan bersifat administratif, bukan substantif.

Implikasi Temuan

Temuan empiris dalam penelitian ini tidak hanya berperan sebagai bukti statistik, tetapi juga membawa implikasi yang lebih luas, baik dalam tataran teoritis maupun kebijakan publik. Kehadiran *flypaper effect* di hampir seluruh provinsi Indonesia membuka ruang diskusi penting mengenai makna kemandirian fiskal dalam praktik desentralisasi keuangan daerah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan penguatan yang nyata terhadap dua gagasan penting dalam ekonomi publik: teori *flypaper effect* dan teori ketergantungan fiskal. Ketika koefisien regresi untuk transfer pusat (TKDD) terbukti lebih besar dan lebih signifikan dibandingkan PAD, maka asumsi normatif bahwa pemerintah bersikap netral terhadap sumber dana kembali dipertanyakan.

Dalam pendekatan ekonomi rasional, seharusnya pemerintah daerah tidak membedakan antara dana dari pusat dan dana dari PAD karena keduanya memiliki nilai nominal yang sama. Namun, hasil penelitian ini kembali memperlihatkan bahwa perilaku belanja pemerintah daerah tidak sepenuhnya rasional secara ekonomi murni, melainkan sangat dipengaruhi oleh persepsi dan preferensi terhadap sumber dana.

Temuan ini memperkuat teori *flypaper* sebagaimana dijelaskan oleh Hines dan Thaler (1995), dan telah terbukti pula di berbagai konteks lokal, seperti yang dicatat oleh Trisyanti dan Saputra (2022) serta Rafi dan Arza (2023).

Secara paralel, hasil ini juga memberi dukungan pada teori ketergantungan fiskal, bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mandiri dalam membiayai pengeluarannya. Seperti yang diungkap oleh Imran et al. (2023), ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat bukan hanya melemahkan insentif untuk menggali PAD, tetapi juga berisiko menciptakan moral hazard dalam pengelolaan fiskal daerah.

Dalam tataran kebijakan, hasil penelitian ini membawa satu pesan utama yang jelas: banyak provinsi di Indonesia masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Meskipun desentralisasi telah berjalan lebih dari dua dekade, realitas fiskal menunjukkan bahwa sebagian besar daerah belum memiliki kapasitas yang cukup untuk membiayai belanjanya secara mandiri. Ketimpangan PAD antarprovinsi, sebagaimana terlihat dari data, menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki basis fiskal yang sama untuk menopang desentralisasi secara berkeadilan.

Temuan ini seharusnya menjadi sinyal kuat bagi para pengambil kebijakan fiskal nasional bahwa desain sistem transfer fiskal perlu dikaji ulang, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari aspek kualitas, insentif, dan keberlanjutan. Transfer fiskal tidak bisa terus-menerus berperan sebagai penyangga kelemahan PAD, tetapi harus diarahkan untuk mendorong daerah membangun kapasitas fiskal jangka panjang.

Melihat temuan tersebut, sudah saatnya reformasi keuangan daerah perlu difokuskan pada

upaya penguatan PAD. Ini dapat dilakukan melalui Diversifikasi sumber pendapatan lokal, Digitalisasi sistem perpajakan daerah, Insentif fiskal berbasis kinerja (*fiscal performance-based grants*), dan Peningkatan kapasitas aparatur fiskal daerah. Tanpa pergeseran paradigma tersebut, desentralisasi fiskal akan tetap berjalan di atas kerangka ketergantungan, bukan kemandirian.

Temuan *flypaper effect* dalam penelitian ini tidak hanya memperkuat teori yang sudah ada, tetapi juga menjadi refleksi atas bagaimana kebijakan fiskal daerah selama ini masih terjebak pada pola-pola struktural yang membuat pemerintah daerah nyaman bergantung pada pusat. Jika desentralisasi dimaksudkan untuk mendekatkan sumber daya kepada masyarakat, maka kemandirian fiskal harus menjadi pilar utama yang diperjuangkan secara nyata, bukan sekadar norma administratif.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menakar tingkat kemandirian fiskal provinsi-provinsi di Indonesia melalui pengujian keberadaan *flypaper effect* sepanjang tahun anggaran 2024. Dengan menggunakan model regresi linier berganda, analisis dilakukan terhadap dua variabel utama yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk mengetahui seberapa besar masing-masing berkontribusi terhadap Belanja Daerah.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap belanja. Namun, pengaruh TKDD tercatat jauh lebih dominan dibandingkan PAD, sebagaimana tercermin dari nilai koefisien regresi masing-masing. Keadaan ini mengindikasikan bahwa *flypaper effect* benar-benar terjadi di tingkat provinsi di Indonesia, yang berarti bahwa belanja pemerintah daerah lebih terdorong oleh dana transfer pusat ketimbang upaya fiskal daerah itu sendiri.

Temuan ini tidak hanya memperkuat teori *flypaper effect*, tetapi juga mencerminkan tingkat ketergantungan fiskal yang masih tinggi di banyak daerah. Meskipun secara administratif desentralisasi fiskal telah berjalan, namun secara substantif banyak daerah belum menunjukkan kapasitas yang memadai untuk berdiri secara fiskal mandiri. Ketimpangan PAD antarprovinsi menjadi cerminan konkret bahwa otonomi keuangan masih belum merata secara nasional.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya memperkuat PAD sebagai instrumen kemandirian, tetapi juga menyoroti perlunya restrukturisasi dalam desain kebijakan fiskal daerah agar desentralisasi benar-benar bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Imran, A. F., Bado, B., & Sumarwadi, H. (2023). *Understand fiscal decentralization and the Potential Moral Hazard in Indonesia*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Jumlah data APBD yang diterima SIKD 546 pemda*. Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Muhammad Yudhistira, A., & Setiawati, E. Z. Z. (2022). *Flypaper effect on Regional Expenditure and the Imp on Regencies/Municipalities Financial Performance in Indonesia*.
- Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). *Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera*.
- Rahmasari, F. T., Darmastuti, D., & Nurrahman, A. K. (2024). *Local Finance and Regional Expenditures: Is There a Flypaper Effect in Indonesia?*
- Ramadhani, R., Albab, F. N. U., & Aryan Danil Mirza BR. (2022). *Does Flypaper Effect Really Exist? Evidence From Government Budget in East Indonesia*.
- Septianingrum, N., Halim, A., & Utami, T. (2025). *Local Expenditure Financing Response in Regencies and Municipalities in Indonesia: Analysis of the Flypaper Effect Phenomenon*.

- Trisyanti, D. I., & Saputra, P. M. A. (2022). *Analisis Flypaper Effect pada PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kib dan Kit.*
- Wira, P. E. N., & Dewi, N. A. W. T. (2023). *Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2019–2021).*
- Wulandari, I., & Gantjowati, E. (2021). *Flypaper Effect in Indonesian Municipal Governments' Expenditures.*